

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia

Hari : Senin

Subyek : Hutan

Tanggal : 01 November 2010

Hal : 08

Bupati Desak Menhut Cabut SK Kawasan Hutan

BUPATI Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Mam ing mendesak agar Menteri Kehutanan mencabut Surat Keputusan Nomor 453 Tahun 2009, yang mengatur soal kawasan hutan di wilayahnya. Alasannya karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

SK Menhut Nomor 453 / 2009 mengatur soal luas kawasan hutan di suatu daerah yang tidak boleh diganggu gugat. "SK itu terbukti membuat susah kami dan mengganggu pertumbuhan ekonomi Tanah

Bumbu. Faktanya, apa yang diatur dalam SK itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan," kata Mardani.

Dia menuding, saat SK itu disiapkan dan akan diterbitkan, pemerintah pusat tidak melihat kondisi aktual di lokasi.

Mardani menyatakan ia mendukung kebijakan pemerintah pusat yang bersemangat melindungi hutan di Kalsel, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Tapi jangan gara-gara itu, pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan) menetapkan kawasan hutan secara sembarangan.

"Masak, kantor bupati dan kantor polres sebagaimana tertuang dalam SK itu masuk dalam kawasan hutan lindung. Ini kan enggak benar," tegas bupati termuda yang berusia 29 tahun ini.

Disebutkan, Kabupaten Tanah Bumbu kaya dengan bahan tambang. Namun gara-gara SK 453 itu, banyak investor yang tidak berani berinvestasi karena takut dianggap sebagai penyerobot hutan. Kalaupun ada yang tetap ingin berinvestasi, menurut Mardani, di tengah jalan berhenti, sebab sang investor harus mengajukan permohonan izin ke Kementerian Kehutanan yang biasanya berbelit-belit dan harus mengeluarkan dana hingga ratusan juta rupiah.

Mardani menyarankan agar soal itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemprov Kalsel pernah mengajukan pelepasan kawasan hutan hingga satu juta hektare dalam revisi tata ruang.

Namun, pengajuan revisi tata ruang Kalsel masih mengalami kendala terkait adanya penambahan luas kawasan hutan yang akan dilepas dari 300 ribu menjadi 450 ribu hektare.

Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, sebagaimana pernah diberitakan Media Indonesia, mengungkapkan pihaknya masih mengurus penyelesaian Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRVVP) di tingkat pusat meski sebelumnya sudah terbit Kepmen 435/2009 tentang kawasan hutan di Kalsel.

Sebelumnya, Pemprov Kalsel mengajukan revisi RTRWP dengan melakukan pengurangan kawasan hutan seluas 311.420 hektare dari 1,8 juta hektare luas kawasan hutan menjadi 1,5 juta hektare. (Gty/N-1)